

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 330 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan 3. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunanegara. *Hak Negara Dan Warga Negara Atas Tanah Diberbagai Negara*. Cetakan 1., 2020.
- Hadjon, Philipus M, R Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J van Buuren, and F.A.M Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Cetakan 1. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Kansil, Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian ATR/BPN. *Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertahanan Modern Berstandar Dunia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1998.
- Miharja, Marjan. *Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Edited by Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Muchsin. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mulyono, Eugenia Liliawati. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*. Jakarta: Harvarindo, 2003.
- Mulyoto. *Legal Standing*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Cetakan 1. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Parlindungan, Adi Putera. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Peranginangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Salim. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sefrani, Cita Yustia, Iswi Hariyani, and Serfianto D Purnomo. *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Edited by Zulfa Simatur. Cetakan 1. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Edited by I.B Arya Lawa Manuaba. Cetakan 1. Bali: Nilacakra, 2018.
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2011.

Jurnal Internasional/Nasional

- Agustina, Enny. “Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik.” *Solusi* 19, no. 3 (2021): 341–58.
- Andari, Dwi Wulan Titik, and Dian Aries Mujiburohman. “Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 154–70. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>.
- Apriani, Desi, and Arifin Bur. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220–39.
- Ardani, Mira Novana. “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 268–86. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>.
- Ariadi, I Wayan. “Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 1 (2016): 175–83. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p16>.

- Gunanegara. "Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184>.
- Intansari, Oktaviantin, and Edith Ratna. "Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 916–22. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41540>.
- Kamal, Mohammad Rizqi Safirul. "Kebijakan Pembuatan Akta PPAT Secara Elektronik: Pemenuhan Syarat Otentik, Implementasi, Dan Alternatif Kebijakan." *Repertorium* 12, no. 2 (2023): 125–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3110>.
- Kamal, Mustafa. "Implementasi Cuti PTAT Sebelum Menjalankan Jabatan Tiga Tahun Berdasar Peraturan Jabatan PTAT." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 526–35. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art13>.
- Kharisma, Bella, and I Gede Agus Kurniawan. "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 320–34. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p07.belum>.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Trasformasi Dari Kertas Ke Elektronik : Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik." *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2023): 57–67. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>.
- Nafan, Muhammad. "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3342–55.
- Nuridin, and Muhammad Wildan. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 192–201. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.91>.
- Nurwulan, Pandam. "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 183–202.
- Ramadhani, Grety Putri. "Analisis Yuridis Terhadap Diberlakukannya Sertipikat Elektronik Kaitannya Sebagai Alat Bukti Di Persidangan." *Jurnal Signifikan Humaniora* 2, no. 2 (2021): 1–20.
- Ramadhani, Rahmat. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 139–57. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144>.
- Ramasari, Risti Dwi, and Shella Aniscasary. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>.
- Rokhmansyah, Mohammad Firza, and Nynda Fatmawati Octarina. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 516–36.
- Rukmanto, Maria Angelica. "Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS Yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 1 (2021): 104–19.

<https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i1.5096>.

- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sari, Ratih Mega Puspa, Sidik Purnama, and Gunarto Gunarto. "Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 241–46.
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068>.
- Simatupang, Frans Meyer. "Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Dan Akibat Hukumnya." *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 62–89. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.9213>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sugiarto, Enan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata." *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 182–99. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2171.g2074>.
- Susanto, R.B Herry. "Tantangan Dan Peluang Implementasi Keputusan Elektronik Dalam Pemerintahan Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Indonesia* 36 (2023).
- Syahroni, Nurul Khomariyah, and Gunanegara. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Notary Journal* 2, no. 2 (2022): 152–65.
- Triyanti, and Hari Purwadi Harjono. "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris." *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 20–30.
- Tulenan, Ghita Aprilia. "Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 122–30.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid." *Credito* 1, no. 1 (2019): 40–51. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.
- Widianugraha, Prama. "Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 208–23.
- Widyastuti, Erna Ferika. "Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 476–84. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art7>.
- Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi." *Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 62–71. <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1440>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (1997).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (1998).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil Penelitian

Tambing, Mesak. “Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yng Mengalami Kebutaan.” Skripsi, Makassar: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

Website/Internet

Rizkinaswara, Leski. “Perubahan Kedua Atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital.” <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/>.

Kamus/Encyclopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Tanah.” <https://kbbi.web.id/tanah>, diakses pada 1 Mei 2024